



# RENCANA KERJA TAHUN 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia dan Petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dapat disusun sebagai pedoman awal dalam penyusunan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode tahun 2023 baik berupa kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat maupun kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan atas kajian terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan mempertimbangkan kemampuan dukungan sumber dana dan sumber daya lainnya. Karena itu penyusunannya sangat memperhatikan pertimbangan yang realistik sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaannya dapat dihindari berbagai permasalahan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja ini sangat penting sebagai bahan evaluasi Pemerintah Daerah terhadap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan, dengan harapan akan dapat membantu melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan khususnya dalam mengawal Perda/Pergub demi terciptanya kondisifitas daerah, rasa aman, nyaman dan tentram ditengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Akhirnya teriring harapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat bermanfaat dan dipedomani oleh seluruh unit-unit kerja serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugas-tugas kini dan mendatang, sembari terus berupaya untuk menyempurnakannya guna menyesuaikan dengan ketentuan dinamika dan kompleksitas tugas, terima kasih.

Mataram, 2022  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

TRI BUDIPRAYITNO  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19681016 198803 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Landasan Hukum .....	3
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4.    Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU.....	7
2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja .....	7
2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	23
2.3.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .....	31
2.3.1.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	31
2.3.2.    Rekomendasi dan Catatan Strategis .....	32
2.4.    Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .....	36
2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	50
3.1.    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	50
3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja .....	51
3.2.1.    Tujuan .....	51
3.2.2.    Sasaran .....	51
3.2.3.    Indikator Kinerja Utama.....	56
3.3.    Program dan Kegiatan .....	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	66
BAB V PENUTUP.....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA.....	8
Tabel. 2. 2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S/D TAHUN 2020 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.....	19
Tabel. 2. 3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23
Tabel. 2. 4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023.....	38
Tabel. 2. 5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	49
 Tabel. 3. 1 IDENTIFIKASI DAN KONSISTENSI KEBIJAKAN .....	50
Tabel. 3. 2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH .....	58
 Tabel. 4. 1 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN .	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja adalah bagian dari proses perencanaan pembangunan yang diawali penyusunan kebijakan, penyusunan rencana, penyusunan pembiayaan, pematauan dan evaluasi kinerja dan penyempurnaan program pembangunan. Sedangkan penyusunan program adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, sebagai dokumen tahunan, maka keberadaan Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis bagi perangkat daerah itu sendiri karena didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi, program, kegiatan dan sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023.

Mengingat Pentingnya dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk optimalisasi pencapaian maka Rencana Kerja yang disusun bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian yang didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Nusa Tenggara Barat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi bahan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dan sebagai bahan Perangkat Daerah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja tahun berikutnya. Di samping penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang merupakan proses perencanaan dan penganggaran berikutnya juga harus mengacu kepada RKPD Tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai tolok ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Satpol PP Prov. NTB, dengan maksud agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menguraikan gambaran umum pencapaian pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian Tahun yang sedang berjalan.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Perda serta perlindungan masyarakat.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang rencana kerja dan rencana pendanaan indikatif tahun rencana 2023.

- **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **TAHUN LALU**

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja**

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP Provinsi NTB ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Satpol PP Provinsi NTB dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu pada periode Renstra Tahun 2019-2023 dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan (tahun 2022).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB s/d tahun 2022, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel. 2. 1  
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S/D TAHUN 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase perda/perkada yang dilanggar	%	14.29		20.00	18.92	105.41	17.14	17.14	100
		Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	%	62.39		60.68	53.85	88.73	61.54	61.54	100
		Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	%	7.14		2.56	2.56	100.00	5.00	5.00	100
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD		BB		BB	BB	100.00	BB	BB	100
X.XX.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	32		11	12	109.09	10	10	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4		1	1	100	1	1	100
X.XX.01.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	100
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	100
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	100
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3		1	1	100	1	1	100
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	5		2	2	100	1	1	100
X.XX.01.1.01.06		Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen						1	1	100
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18		6	7	116.67	6	6	100
X.XX.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	45		15	15	100	15	15	100
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	200		150	140	93.33	180	180	100
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1		1	3	33.33	1	1	100
		Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8		8	-	8	8	8	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	3		1	1	100.00	1	1	100
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD	Laporan	26		18	18	100.00	4	4	100
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	36		12	-	-	12	12	100
X.XX.01.1.03.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	Dokumen	6		2	2	100	2	2	100
X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3		1			1	1	100
X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan	18		6			6	6	100
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen	5		2	2	100	1	1	100
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						1	1	100
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	2		2			2	2	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	200		200	-	-	200	200	100
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	1800		600	-	-	600	600	100
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang	140		30	-	-	50	50	100
X.XX.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8		8	8	100	8	8	100
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5		5	-	-	5	5	100
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	71		34	34	100	20	20	100
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	21		11	-	-	5	5	100
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	30		30	25	83	30	30	100
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	9		9	8	89	9	9	100
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	16675		5475	1,369	25	5600	5600	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	3510		1110	1,110	100	1200	1200	100
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	5		5	5	100	5	5	100
X.XX.01.1.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>Buat/Set/ Unit</b>	<b>190</b>		<b>92</b>	<b>4</b>	<b>4.35</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100</b>
X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	3		1			1	1	100
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	18		2	4	100	9	9	100
X.XX.01.1.07.04		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	10		-			5	5	100
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/ Unit	101		54			22	22	100
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	5		2			2	2	100
X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit	63		33			20	20	100
X.XX.01.1.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>Jasa</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	1500		600	600	100	1000	1000	100
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	6		6	8	133	6	6	100
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	9		5	8	160	9	9	100
X.XX.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	482		103	51	49.51	171	171	100
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6		20	-		6	6	100
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	50		16	10	63	40	40	100
X.XX.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	30		17	-		22	22	100
X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	110		50			30	30	100
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	234		66	41	62	73	73	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirahabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	1		1	-		1	1	100
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	7		-	-		3	3	100
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	5		-	-		2	2	100
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100		100	100	100	100	100	100
		Percentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15		17	13	76.47	16	16	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	36		12	12	100	12	12	100
		Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten n/ Kota	10		10	10	100	10	10	100
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	30		10	-	-	10	10	100
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan	30		10	10	100	10	10	100
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	15		17	13	76.47	16	16	100
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	6		2	1	50.00	2	2	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali	4		1	1	100	1	1	100
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang	200		100	-	-	100	100	100
		Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	2100		400	320	80	600	600	100
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang	725		675	75	11	725	725	100
		Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang	170		50	60	120	60	60	100
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	3		1	1	100	1	1	100
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis	6		5			6	6	100
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP	2		1			1	1	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	36		12	-	-	12	12	100
1.05.02.1.02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	16	765,719,562	18	11	61.11	17	17	100
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupaten n/ Kota	10		10	10	100	10	10	100
		Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali	30		10	9	90	10	10	100
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	36		12	22	183	12	12	100
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	36		12	15	125	12	12	100
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	16	-	18	11	61.11	17	17	100
1.05.02.1.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	131		43	-	-	43	43	100
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	120		40	-	-	40	40	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan 2022	
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	11		3	-	-	3	3	100
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	5		1	1	100	2	2	100
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	5		1			2	2	100
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	12		4			4	4	100

**Tabel. 2. 2**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S/D TAHUN 2020**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)
<b>Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>								
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>								
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>								
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	persen	100	20.00	100.00	100	100.00
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Bulan	60	12	12	12	100.00
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi	bulan	60	12	12	12	100.00
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan	bulan	60	12	12	12	100.00
01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	bulan	60	12	12	12	100.00
01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Hasil koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan	bulan	60	12	12	12	100.00
01.25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Arsip yang terakuisisi	berkas	18,000	3,600	3,600	3,600	100.00
02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>24.46</b>	100	<b>98</b>	<b>98.31</b>
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	unit	16	2		-	
02.10	Pengadaan mebeuler	Jumlah mebeuler yang tersedia	set/buah	69	29		-	
02.11	Pengadaan UPS/Stabiliser, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah alat elektronik yang tersedia	unit	61	32	3	3	100.00
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	unit	200	33	35	35	100.00
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	unit	255	51	51	51	100.00
03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>Paket</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	2	<b>2</b>	<b>100</b>
03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Paket	5	1	2	2	100.00
06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rencana Program</b>	<b>dokumen</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	6	6	<b>100.00</b>
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	dokumen	15	3	3	3	100.00
06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD	dokumen	17	4	3	3	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
07	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Manajemen Asset</b>	dokumen	<b>DOK</b>	<b>2</b>	2	<b>2</b>	<b>100.00</b>
07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/ barang milik daerah	dokumen	10	2	2	2	100.00
15	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Percentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)</b>	orang	<b>100</b>	<b>16</b>	100	-	-
15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Satlinmas yang terlatih	org	600				
15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Gelar Pasukan Satlinmas	orang	2,500	400	500	-	-
15.08	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Masyarakat yang ikut Berpartisipasi	orang	3,000	600	600	-	-
16	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Percentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)</b>	Per센	<b>100</b>	<b>20</b>	100	<b>100</b>	<b>100.00</b>
16.07	Pencegahan, penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat	Jumlah Kegiatan Terpadu	kali	20	4	4	2	50.00
16.08	Peningkatan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI)	Jumlah Kegiatan Turjawali	bulan	60	12	12	12	100.00
16.09	Bimtek Teknis Petugas khusus Wisata Halal	Jumlah Petugas Khusus Wisata Halal yang terlatih	orang	100		50	-	-
16.10	Rapat Pengawasan dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB	Jumlah peserta rapat koordinasi pengawasan dan penegakan Perda	keg	5				
16.11	Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital	Jumlah kegiatan pengamanan dan penanganan asset	kali	16				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Pemda di Luar dan Dalam Daerah							
16.13	Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah operasi yustisi	kegiatan	29	5	9	9	100.00
16.15	Pengamanan/ Pengawalan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB	Jumlah lokasi pengamanan, pengawalan pejabat dan tamu serta kegiatan pemda di Kab/Kota	Kab/Kota	10	36	10	10	100.00
16.17	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Jumlah kegiatan Pengawasan Aparatur	kali	60	12	12	3	25.00
16.18	Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa	Jumlah Personil yang mengikuti gelar pasukan	orang	3,000	600	600	600	100.00
20	<b>Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas</b>	persen	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	<b>100.00</b>
20.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan instansi/mitra terkait dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah peserta rapat koordinasi tibum dan tranmas	kali	5	1	40	-	-
20.10	Operasi Wibawa untuk pemberantasan PEKAT (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba)	Jumlah kegiatan operasi PEKAT	kali	30	6	6	2	33.33
20.11	Pemetaan Kawasan Rawan Pekat di Masyarakat	Jumlah peta kawasan rawan penyakit masyarakat (PEKAT)	dokumen	1			-	
20.12	Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendektesian dini dan pencegahan konflik di masyarakat	Jumlah masyarakat yang memahami pendektesian dini dan pencegahan konflik	orang	600			-	
20.13	Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perka melalui Pendekatan Kearipan Lokal	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat	kali	40	8	8	-	-

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 yang telah ditetapkan yakni "Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang", selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam mewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harus diperlukan suasana yang aman, tenram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat.

Agar dapat memberikan rasa aman, tenram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan sosialisasi, pengawasan, pengawalan dan penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Pergub Provinsi NTB.

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan dimaksud maka tercantum dalam Perubahan Renstra periode Tahun 2019-2023 dan mengacu pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2019-2023.

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB ditampilkan sesuai tabel berikut:

Tabel. 2. 3  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Persentase perda/perkada yang dilanggar	%			20.00	17.14	14.29		18.92		14.29			
	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	%			60.68	61.54	62.39		53.85		62.39			

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	%			2.56	5.00	7.14		2.56		7.14		
	Nilai SAKIP PD				BB	BB	BB		BB		BB		
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen			11	10	11		12		11		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			1	1	2		1		2		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Dokumen			1	1	1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen			1	1	1		1		1		
	Jumlah DPA- SKPD	Dokumen			1	1	1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen			1	1	1		1		1		
	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen			2	1	2		2		2		
	Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen				1							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			6	6	6		7		6		
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen			15	15	15		15		15		
	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang			150	180	200		140		200		
	Jumlah Tenaga Administrasi	Orang			1	1	1		3		1		

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	dan Teknis Perkantoran												
	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang			8	8	8				8		
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen			1	1	1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran SKPD	Laporan			18	4	4		18		4		
	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan			12	12	12		-		12		
	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	Dokumen			2	2	2		2		2		
	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			1	1	1				1		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan			6	6	6				6		
	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen			2	1	2		2		2		
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				1							
	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang			2	2	2				2		
	<b>Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi</b>	Orang			200	200	200		-		200		

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	<b>Standar Administrasi</b>												
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel			600	600	600		-		600		
	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang			30	50	60		-		60		
	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia</b>	<b>Jenis</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>		
	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis			5	5	5		-		5		
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah			34	20	17		34		17		
	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis			11	5	5		-		5		
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis			30	30	30		25		30		
	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis			9	9	9		8		9		
	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar			5475	5600	5600		1,369		5600		
	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak			1110	1200	1200		1,110		1200		
	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis			5	5	5		5		5		
	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>Buat/Set/ Unit</b>			<b>92</b>	<b>54</b>	<b>44</b>		<b>4</b>		<b>44</b>		
	Jumlah Kendaraan	Unit			1	1	1				1		

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Dinas Jabatan yang Tersedia												
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit			2	9	7		4		7		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit			-	5	5				5		
	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/ Unit			54	22	25				25		
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah			2	2	1				1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit			33	20	10				10		
	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa			9	9	9		9		9		
	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat			600	1000	1500		600		1500		
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening			6	6	6		8		6		
	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang			5	9	9		8		9		
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit			103	171	208		51		208		
	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit			20	6	6		-		6		

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit			16	40	50		10		50		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit			17	22	27		-		27		
	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit			50	30	30				30		
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit			66	73	95		41		95		
	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung			1	1	1		-		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit			-	3	4		-		4		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit			-	2	3		-		3		
	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	%			100	100	100		100		100		
	<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	%			100	100	100		100		100		
	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus			17	16	15		13		15		

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali			12	12	12		12		12		
	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten / Kota			10	10	10		10		10		
	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah			10	10	10		-		10		
	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan			10	10	10		10		10		
	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus			17	16	15		13		15		
	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali			2	2	2		1		2		
	Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali			1	1	2		1		2		
	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang			100	100	100		-		100		
	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang			400	600	700		320		700		
	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang			675	725	725		75		725		
	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang			50	60	80		60		80		
	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama			1	1	1		1		1		

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis			5	6	6				6		
	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP			1	1	-				-		
	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali			12	12	12		-		12		
	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus			18	17	16		11		16		
	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupaten / Kota			10	10	10		10		10		
	Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali			10	10	10		9		10		
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali			12	12	12		22		12		
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali			12	12	12		15		12		
	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus			18	17	16		11		16		
	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang			43	43	45		-		45		
	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang			40	40	40		-		40		

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 TW I	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang			3	3	5		-		5		
	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas			1	2	2		1		2		
	Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali			1	2	2				2		
	Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis			4	4	4				4		

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

#### 2.3.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah:

1. Sumber Daya Aparatur (Anggota) Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
3. Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
4. Masih tingginya pelanggaran terhadap Hak-Hak Sipil, Hukum dan HAM.
5. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat masih rendah.
6. Tingkat kriminalitas masih tinggi.
7. Masih maraknya penyakit masyarakat.
8. Konflik-konflik horizontal masih tinggi.
9. Penegakan Perda dan Pergub belum optimal terutama yang berorientasi penerimaan asli daerah (PAD).

### 2.3.2. Rekomendasi dan Catatan Strategis

#### 1. Untuk Sumber Daya Aparatur (Anggota) masih kurang

Hasil telaahan kebutuhan personil Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang penetapan jumlah personil Satpol PP, bahwa Satpol PP Provinsi NTB memiliki skor sebesar 819 skor atau seharusnya Jumlah ideal anggota Satpol PP Provinsi NTB berkisar antara 301 s/d 400 orang. Kondisi kekurangan personil seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas Satpol PP, sehingga diharapkan jumlah anggota yang ideal mencapai minimal sebanyak 301 personil. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta operasional pengamanan dan penegakan Perda dan Pergub sejalan dengan perkembangan pembangunan.

#### 2. Kualitas Sumber Daya Aparatur, personil masih harus ditingkatkan/ belum memadai

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Nusa Tenggara Barat. Kondisi relatif masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi Nusa Tenggara tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Pergub (PPNS) serta teknis perlindungan masyarakat.

#### 3. Masih terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mendukung pelaksanaan tugas trantibum perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan dan menuntaskan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum yaitu, pelanggaran Perda, Pergub. Proses pelaksanaan tugas harus selalu mengacu pada pedoman prosedur tetap (protap), sehingga pelaksanaan tugas tidak melanggar rambu-rambu aturan yang ditetapkan dalam upaya penyelesaian masalah trantibum di masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut gangguan trantibum berupa:

Konflik/perkelahian masal antar desa, antar lingkungan, antar kelompok, perkelahian masal, demonstrasi, anarkis masal dan bencana alam serta pengaruh alam lainnya.

4. Masih terjadi pelanggaran terhadap Hak-Hak Sipil, Hukum dan HAM Perlindungan hak sipil dan masyarakat masih merupakan opini publik dalam hal mencari hak dan keadilan baik dalam kehidupan menyangkut sosial, ekonomi, demokratisasi dan hak Asasi Manusia. Upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia merupakan upaya semua pihak baik aparatur maupun masyarakat dengan memperhatikan aspek keanekaragaman, nilai sosial, nilai budaya khususnya agama, adat istiadat, lokal kultur dan aspek lainnya yang dijunjung tinggi. Nilai kesamaan dan kesetaraan dalam masyarakat menginginkan terwujudnya perlindungan yang sama di muka hukum serta dapat mengembangkan dinamika kehidupan masyarakat secara demokratis tegaknya hukum dan menghormati HAM. Perlindungan hak-hak sipil dalam Hukum dan HAM sebagai warga Negara setiap individu mempunyai hak yang sama mendapatkan perlindungan Hukum tanpa kecuali serta mempunyai hak untuk hidup bebas dari rasa takut serta berhak mendapat rasa aman dan tenram dalam suasana kehidupan berdemokrasi.

5. Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat perlu ditingkatkan

Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang heterogen yaitu dengan adanya berbagai agama, suku dan budaya yang merupakan wujud pluralisme yang secara kultur mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi perbedaan itu merupakan wujud kekayaan yang perlu dipertahankan dalam kerangka persatuan dan kesatuan, bahwa sektor ekonomi menjadikan suatu masalah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan tingginya kemiskinan yang berdampak kepada tingkat kriminalitas dan instabilitas sosial, ekonomi maupun masyarakat. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran hukum.

6. Tingkat kriminalitas masih terjadi

Nusa Tenggara Barat tergolong rawan terhadap kriminalitas terutama kejahatan konvensional ini ditandai masih banyaknya pelanggaran hukum seperti mengambil hak milik orang lain secara illegal, pencurian, perampasan dan lain-lain. Hal ini terjadi karena pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan hukum masih lemah, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Karena ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tentram.

7. Masih maraknya penyakit masyarakat

Bahwa sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat kehidupan global yang mempunyai dampak positif dan negatif terhadap dinamika kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak merata

mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, sehingga berpengaruh besar terhadap ketenteraman dan ketertiban. Ekonomi masyarakat yang rendah dan majemuk akan menjadi salah satu pemicu timbulnya kasus-kasus penyakit masyarakat, sehingga perilaku dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu dan tidak harmonis. Upaya-upaya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat perlu ditingkatkan antara lain melalui operasi non yustisi dalam rangka pencegahan peradaran minuman keras, praktik prostitusi dan premanisme.

8. Konflik-konflik horizontal masih terjadi

Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat diantaranya, perkelahian antar remaja kampung, antar suku dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak. Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan antisipasi secara dini agar konflik tidak meluas ketempat yang lain. Penyelesaian konflik ini perlu dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi oleh aparat penegak hukum agar kondisi keamanan dan ketertiban agar dapat berjalan secara kondusif.

9. Penegakan Perda dan Pergub masih belum optimal

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Pergub serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Pergub kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:

- Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

- b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Prov. NTB sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

#### **2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satpol PP bertugas untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang didalam Pasal 255 ayat (1).

Pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) sub urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu:

1. Sub Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum kewenangan pemerintah provinsi adalah :
  - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
  - b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur.
  - c. Pembinaan PPNS Provinsi.
2. Sub Urusan Bencana kewenangan pemerintah provinsi adalah penanggulangan bencana provinsi terkait sub urusan bencana peran Satpol PP adalah mendukung penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh badan/instansi yang berwenang dengan melakukan pembinaan dan memperkuat fungsi linmas di kab/kota.

3. Sub Urusan Kebakaran kewenangan pemerintah provinsi adalah pemetaan rawan kebakaran

Tabel. 2. 4  
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP PD		BB	22,695,458,356	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP PD		BB	24,023,622,331	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	11	415,181,406	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	11	422,180,900	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	93,878,911	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100,879,000	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	31,974,464	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	31,974,300	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	31,974,464	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	31,974,400	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
			Perubahan RKA-SKPD						Perubahan RKA-SKPD				
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,509,416	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,509,300	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,509,416	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,509,300	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	43,109,153	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	43,108,900	
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	203,225,581	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	203,225,700	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	15	18,681,068,168	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	15	18,703,346,031	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi NTB	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan	200	18,514,058,831	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi NTB	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan	200	18,514,058,831	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
			Gaji dan Tunjangan ASN						Gaji dan Tunjangan ASN				
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	13,053,609	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	35,092,000	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	29,758,016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	29,747,900	
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	4	124,197,712	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	4	124,447,300	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2	16,713,918	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	2	207,546,700	
1)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Laporan	2	16,713,918	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Laporan	2	25,751,700	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
			Milik Daerah pada SKPD						Milik Daerah pada SKPD				
2)	Pengadaan Mebeleur	Provinsi NTB	Jumlah Mebeleur yang disediakan	Laporan	200	-	Pengadaan Mebeleur	Provinsi NTB	Jumlah Mebeleur yang disediakan	Laporan	200	181,795,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	600	213,415,798	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	600	954,810,000	
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi NTB	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	60	171,567,942	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi NTB	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	60	872,010,000	
2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	41,847,857	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	82,800,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	5	1,056,389,903	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	5	724,847,200	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14	281,735,176	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14	28,656,800	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	178,532,160	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	175,310,000	
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi NTB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	46,659,947	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi NTB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	6,574,900	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	39,881,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	26,096,100	
5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi NTB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	29,850,368	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi NTB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	21,009,400	
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	23,322,323	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14,400,000	
7)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	39,512,867	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	36,800,000	
8)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	416,895,462	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	416,000,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	3	1,021,300,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	3	1,516,366,200	
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1,021,300,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1,516,366,200	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa	9	430,352,137	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa	9	714,295,300	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
			Daerah yang Tersedia						Daerah yang Tersedia				
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	6,257,192	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	132,720,000	
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	34,073,749	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	131,220,000	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	390,021,196	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	450,355,300	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	152	861,037,026	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	152	780,230,000	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	232,037,819	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	213,500,000	
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	376,106,922	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	365,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95	75,135,924	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95	31,730,000	
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	177,756,361	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	170,000,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Percentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	4,709,733,772	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Percentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	4,030,975,056	
			Percentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100				Percentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100		
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	11	3,651,156,380	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	11	3,002,239,324	
1)	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Provinsi NTB	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Kasus	3	1,055,204,551	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Provinsi NTB	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Kasus	3	848,820,424	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
	Pengamanan, dan Pengawalan		Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				Pengamanan, dan Pengawalan		Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				
2)	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi NTB	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	11	359,449,308	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi NTB	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	11	329,449,000	
3)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	4	116,707,334	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	4	62,908,000	
4)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	375,368,211	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	68,200,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
5)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernaunsa Hak Asasi Manusia	Provinsi NTB	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	805	447,453,937	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernaunsa Hak Asasi Manusia	Provinsi NTB	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	805	316,909,100	
6)	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	81,025,036	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	81,024,800	
7)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Provinsi NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	12	994,850,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	12	1,090,850,000	
8)	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	10	136,700,000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	10	119,683,000	
9)	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	84,398,002	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	84,395,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
	dan Peraturan Kepala Daerah						dan Peraturan Kepala Daerah						
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	10	821,248,215	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	10	909,594,332	
1)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3	368,329,921	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3	256,685,932	
2)	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	2	228,345,084	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	2	428,335,400	
3)	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	1	224,573,209	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	1	224,573,000	
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	45	237,329,178	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	45	119,141,400	
1)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan	Laporan	2	156,186,159	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi NTB	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan	Laporan	2	36,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9a	10	11	12
			Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda						Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				
2)	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	1	81,143,018	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	1	83,141,400	
		Provinsi NTB	Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	2			Provinsi NTB	Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	2		
		Provinsi NTB	Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	4			Provinsi NTB	Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	4		

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel. 2. 5

### USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	1	
			<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	1	
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum</b>	11 Kasus	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kabupaten Sumbawa Barat	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	3 Kasus	Pemeriksaan Penerapan Protokol Kesehatan, Pemetaan Wilayah Gangguan
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Sumbawa Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	12 Unit	Pengadaan Sarana Prasarana Minimal Satpol PP (10 unit motor)

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tabel. 3. 1  
IDENTIFIKASI DAN KONSISTENSI KEBIJAKAN

➤ Prioritas RPJMN	:	Misi RPJMN Tahun 2020-2024: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
➤ Arah kebijakan dan RKP 2023 (Perioritas Nasional Tahun 2023)	:	<i>Prioritas Nasional 7: Percepatan Pembangunan Dengan Penekanan Struktur Perekonomian Yang Kokoh oleh SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing.</i> Dengan strategi: a. Transformasi Ekonomi b. Wilayah Basis Pembangunan c. SDM berkualitas dan berdaya saing d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan e. Pembangunan Infrastruktur f. Lingkungan Hidup dan Kerentanan Bencana g. Kondisi Polhukankam yang kondusif
➤ Prioritas RPJMD	:	Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023: Misi 6 “NTB AMAN DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan
➤ Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023	:	1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, 3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan <i>decent job</i> ,

		4. Pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
➤ Tema pembangunan Daerah NTB Tahun 2023	:	“Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegembilangan NTB yang berkelanjutan”
➤ Program Prioritas Tahun 2023	:	Penguatan Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
➤ Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	:	<p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat</li> <li>2. Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas</li> <li>3. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas</li> </ol>

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

#### 3.2.1. Tujuan

Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB.

#### 3.2.2. Sasaran

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah:

1. Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat
2. Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas

3. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas.

Sasaran tersebut didukung oleh beberapa Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan untuk Tahun 2023 antara lain:

**a. Meningkatnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD
3. Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD
5. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan**

1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

5. Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  1. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  2. Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  3. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. **Tersedianya Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi**
  1. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
  2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
  4. Tersedianya Bahan Logistik Kantor
  5. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  6. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  7. Tersedianya makanan dan minuman Tamu
  8. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. **Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
  2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
4. Tersedianya Mebel
5. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**h. Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

**i. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
4. Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
5. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**j. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

1. Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan PengawalanTerlaksananya pengawalan dan pengamanan Pejabat dan Tamu Daerah
2. Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
5. Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
8. Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada

**k. Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah**

1. Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

2. Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP

#### I. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM PPNS

1. Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda
2. Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda. Pelaksanaan Sidang di Tempat Operasional Sekretariat PPNS
3. Terlaksananya Sidang di Tempat
4. Tersedianya Layanan Penguatan Sekber PPNS

#### 3.2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/KETERANGAN
Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	$\frac{\sum \text{Perda/perkada yang dilanggar}}{\sum \text{Perda/perkada}} \times 100\%$
Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	$\frac{\sum \text{Wilayah bebas gangguan tibumtranmas}}{\sum \text{Wilayah se-NTB}} \times 100\%$
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi $\geq$ Baik	$\frac{\sum \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun N} - \sum \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun (N-1)}}{\sum \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun (N-1)}} \times 100\%$

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah lainnya, serta perlindungan masyarakat adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel. 3. 2  
 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					28,054,597,387				30,860,057,126
X.XX.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD			BB	24,023,622,331			BB	26,425,984,564
X.XX.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		11	422,180,900			10	464,398,990
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Provinsi NTB	2	100,879,000			1	110,966,900
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	31,974,300			1	35,171,730
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	31,974,400			1	35,171,840

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	5,509,300			1	6,060,230
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Provinsi NTB	1	5,509,300			1	6,060,230
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Provinsi NTB	2	43,108,900			2	47,419,790
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Provinsi NTB	6	203,225,700			6	223,548,270
X.XX.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		15	18,703,346,031			15	20,573,680,634
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Provinsi NTB	200	18,514,058,831			200	20,365,464,714
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Provinsi NTB	1	35,092,000			1	38,601,200
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Provinsi NTB	1	29,747,900			1	32,722,690
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	Provinsi NTB	4	124,447,300			4	136,892,030

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
X.XX.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		2	25,751,700			2	28,326,870
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi NTB	2	25,751,700			2	28,326,870
X.XX.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang		200	954,810,000			200	1,050,291,000
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Provinsi NTB	600	872,010,000			600	959,211,000
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Provinsi NTB	60	82,800,000			60	91,080,000
X.XX.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis		8	724,847,200			8	797,331,920
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi NTB	5	28,656,800			5	31,522,480
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi NTB	14	175,310,000			14	192,841,000
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Provinsi NTB	5	6,574,900			5	7,232,390

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi NTB	30	26,096,100			30	28,705,710
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Provinsi NTB	9	21,009,400			9	23,110,340
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Provinsi NTB	12	14,400,000			12	15,840,000
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Provinsi NTB	12	36,800,000			12	40,480,000
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Provinsi NTB	11	416,000,000			11	457,600,000
X.XX.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit		5	1,698,161,200			5	1,867,977,320
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Provinsi NTB	3	1,516,366,200			3	1,668,002,820
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Provinsi NTB	2	181,795,000			2	199,974,500
X.XX.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa		9	714,295,300			9	785,724,830
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Provinsi NTB	2	132,720,000			2	145,992,000
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Provinsi NTB	3	131,220,000			3	144,342,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Provinsi NTB	1	450,355,300			1	495,390,830
X.XX.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit		152	780,230,000			152	858,253,000
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Provinsi NTB	6	213,500,000			6	234,850,000
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Provinsi NTB	50	365,000,000			50	401,500,000
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Provinsi NTB	95	31,730,000			95	34,903,000
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi NTB	1	170,000,000			1	187,000,000
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%		100	4,030,975,056			100	4,434,072,562
		Percentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%		100				100	
1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus		11	3,002,239,324			11	3,302,463,256
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	Kasus	Kabupaten Lombok Barat,	3	848,820,424			3	933,702,466

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		Kota Mataram						
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram	11	329,449,000			11	362,393,900
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Provinsi NTB	4	62,908,000			4	69,198,800
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Provinsi NTB	2	68,200,000			2	75,020,000
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Provinsi NTB	805	316,909,100			805	348,600,010
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	Provinsi NTB	1	81,024,800			1	89,127,280
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Provinsi NTB	12	1,090,850,000			12	1,199,935,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	Provinsi NTB	10	119,683,000			10	131,651,300
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	Provinsi NTB	1	84,395,000			1	92,834,500
1.05.02.1.02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus		10	909,594,332			10	1,000,553,765
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Provinsi NTB	3	256,685,932			3	282,354,525
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	Provinsi NTB	2	428,335,400			2	471,168,940
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	Provinsi NTB	1	224,573,000			1	247,030,300
1.05.02.1.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang		45	119,141,400			45	131,055,540
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	Provinsi NTB	2	36,000,000			2	39,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	Provinsi NTB	1	83,141,400			1	91,455,540
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	Provinsi NTB	2				2	-
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	Provinsi NTB	4				4	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Dalam rangka implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diperlukan langkah kongkrit untuk memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang ada, melalui program prioritas terpilih dalam bentuk rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP Provinsi NTB, sebagai berikut:

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
  - 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
  - 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Dearah
  - 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan**
  - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- C. Administrasi Umum**
  - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Miliik Daerah
  - 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
  - 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  13. Penyediaan Makanan dan Minuman
  14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  18. Pengadaan Mebeleur
  19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
  20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
  21. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  22. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
  23. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- D. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Formal
  2. Pengadaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
  3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
  4. Pendidikan dan Pelatihan Formal

## II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia
  3. Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
  4. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
  5. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
  6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
  7. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- B. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  3. Penanganan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Program dan kegiatan yang merupakan program prioritas sesuai RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 - 2023, meliputi:

## **I. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteriban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
  3. Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
  4. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
  5. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
  6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
  7. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- B. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  3. Penanganan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagai berikut

Tabel. 4. 1  
 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN  
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	Nilai SAKIP PD		BB	24,023,622,331		
X.XX.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	11	422,180,900		
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100,879,000	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	31,974,300	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	31,974,400	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,509,300	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,509,300	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	43,108,900	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	203,225,700	Sekretariat/Subbag Program	Provinsi NTB
<b>X.XX.01.1.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>18,703,346,031</b>		
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	200	18,514,058,831	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	35,092,000	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	29,747,900	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	4	124,447,300	Sekretariat/Subbag Keuangan	Provinsi NTB
<b>X.XX.01.1.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>25,751,700</b>		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
		<b>Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	25,751,700	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
<b>X.XX.01.1.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi</b>	<b>Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi</b>	Orang	<b>200</b>	<b>954,810,000</b>		
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	600	872,010,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	82,800,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
<b>X.XX.01.1.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia</b>	Jenis	<b>8</b>	<b>724,847,200</b>		
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	28,656,800	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	175,310,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	6,574,900	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	26,096,100	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	21,009,400	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14,400,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	36,800,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	416,000,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
<b>X.XX.01.1.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>Buat/Set/Unit</b>	<b>5</b>	<b>1,698,161,200</b>		
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1,516,366,200	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	181,795,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
<b>X.XX.01.1.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>	<b>Jasa</b>	<b>9</b>	<b>714,295,300</b>		
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	132,720,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	131,220,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	450,355,300	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
<b>X.XX.01.1.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>152</b>	<b>780,230,000</b>		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	213,500,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	365,000,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95	31,730,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	170,000,000	Sekretariat/Subbag Umum	Provinsi NTB
1.05.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>  <b>Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	%	100	<b>4,030,975,056</b>		
			<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	%	100			
1.05.02.1.01.	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum</b>	Kasus	11	<b>3,002,239,324</b>		
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	3	848,820,424	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
							Bidang Tibumtranmas/Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan	Provinsi NTB
							Bidang Tibumtranmas/Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Provinsi NTB
							Bidang Tibumtranmas/Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	11	329,449,000	Bidang Tibumtranmas/Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan	Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	4	62,908,000	Bidang Tibumtranmas/Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawalan	Provinsi NTB
							Bidang Perlindungan Masyarakat/Seksi Bina Potensi Masyarakat	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	68,200,000	Bidang Perlindungan Masyarakat/Seksi Bina Potensi Masyarakat	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
							Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	805	316,909,100	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas	Provinsi NTB
							Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional	
							Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Teknis Fungsional	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	81,024,800	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	12	1,090,850,000	Bidang Tibumtranmas	Provinsi NTB
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	10	119,683,000	Bidang Tibumtranmas	Provinsi NTB

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1	84,395,000	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB
<b>1.05.02.1.02.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>	<b>Kasus</b>	<b>10</b>	<b>909,594,332</b>		
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3	256,685,932	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas	Provinsi NTB
							Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi	Provinsi NTB
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	2	428,335,400	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB
							Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	1	224,573,000	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan Penegakan	Provinsi NTB
<b>1.05.02.1.03.</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM PPNS</b>	<b>Jumlah PPNS Yang Dibina</b>	<b>Orang</b>	<b>45</b>	<b>119,141,400</b>		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu	Penanggungjawab/Pelaksana	Lokasi
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	2	36,000,000	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
							Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas	Provinsi Luar NTB
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda. Pelaksanaan Sidang di Tempat Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	1	83,141,400	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS	Provinsi NTB
<b>TOTAL</b>						<b>28,054,597,387</b>		

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh Kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2023 tidak hanya ditentukan secara akurat dan realistik. Penyusunan Rencana Kerja didukung oleh tekad dan semangat pengabdian seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam implementasi Rencana Kerja di lapangan, tentu akan selalu muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi. Karena itu, diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, semoga dapat menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja/Bidang, dan bermakna bagi pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Mataram, 2022  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

TRI BUDIPRAYITNO  
Pembina Utama Muda ( IV/C )  
NIP.19681016 198803 1 003

